

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Triwulan I 2024 inflasi year on year (yoy) Kota Palu tercatat sebesar 2,41 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,44. Inflasi yoy tertinggi terjadi di Tual sebesar 7,49 persen dengan IHK 117,19 dan terendah terjadi di Merauke sebesar 3,17 persen dengan IHK 112,59.

Inflasi yoy terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau (7,05 persen); kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (4,27 persen); kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (2,72 persen); kelompok kesehatan (1,29 persen); kelompok transportasi (11,34 persen); kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,22 persen); kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (6,34 persen); kelompok pendidikan (0,98 persen); kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (2,25 persen); serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (3,72 persen). Sebaliknya terjadi penurunan indeks harga pada kelompok pakaian dan alas kaki (0,61 persen);

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kota Palu bulan Maret 2024 masing-masing sebesar 0,56 persen dan 0,93 persen.

Inflasi Tahunan Kota Palu pada Triwulan I tahun 2024 sebesar 2,41% (yoy), menurun dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya pada tahun 2023 yaitu 4,94% (yoy) dan periode yang sama pada tahun 2022, yaitu 3,23% (yoy).

Meskipun angka inflasi tahunan Kota Palu menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, perlu dicermati bahwa potensi peningkatan tekanan inflasi masih ada baik dari sisi internal maupun eksternal. Secara internal, kenaikan biaya produksi lokal, perubahan kebijakan fiskal dan moneter, serta fluktuasi dalam permintaan domestik dapat memberikan dorongan terhadap harga-harga barang dan jasa di pasar lokal. Di sisi lain, faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, harga komoditas global, dan gejolak politik di tingkat internasional juga berpotensi mempengaruhi kenaikan harga. Meskipun data menunjukkan penurunan inflasi dari tahun sebelumnya, penting bagi pemerintah dan pelaku ekonomi setempat untuk tetap memperhatikan dan mengelola potensi risiko inflasi yang dapat muncul dari kedua sisi tersebut guna menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Palu secara keseluruhan..

Dalam rentang Januari hingga Februari 2024, Kota Palu mengalami peningkatan inflasi year-on-year yang signifikan, dari 1,98 persen menjadi 2,31 persen. Penyebab utamanya adalah naiknya harga sebagian besar kelompok pengeluaran, terutama kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang meningkat sebesar 7,08 persen. Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mengalami kenaikan harga yang cukup besar sebesar 3,27 persen. Meskipun ada beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, seperti pakaian dan alas kaki, serta kesehatan, kenaikan harga yang signifikan pada kelompok-kelompok utama tersebut menggambarkan tekanan inflasi yang terjadi pada periode tersebut.

Peningkatan tingkat inflasi ini juga tercermin dalam IHK yang mengalami kenaikan dari 104,54 pada Januari menjadi 104,85 pada Februari. Meskipun terdapat sedikit peningkatan

pada tingkat inflasi bulanan (m-to-m) dari 0,07 persen menjadi 0,30 persen, yang menunjukkan pertumbuhan harga dari bulan sebelumnya, tingkat inflasi year-to-date (y-to-d) yang mencapai 0,36 persen menunjukkan bahwa dampak inflasi ini telah terakumulasi sejak awal tahun dan menjadi perhatian utama bagi kebijakan ekonomi dan keuangan di Kota Palu. Inflasi di Kota Palu pada bulan Januari 2024 sebesar 0,07% (mtm) menurun dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya yaitu 0,53% (mtm). Di sisi lain, inflasi di bulan Februari 2024 sebesar 0,30% month to month (mtm), meningkat dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya yaitu -0,17% (mtm). Naiknya inflasi disebabkan karena pada bulan Februari 2023 Kota palu mengalami kenaikan harga di hampir semua kelompok pengeluaran, terutama kelompok makanan, minuman, tembakau, dan transportasi. Ini menyebabkan indeks harga konsumen naik. Hal ini berdampak pada biaya hidup dan kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa.

Beberapa komoditas yang memiliki andil terhadap Inflasi Maret 2024 antara lain: beras, kontrak rumah, dan emas perhiasan, masing-masing dengan kontribusi sebesar 1,15%, 0,24%, dan 0,24%. Diikuti oleh Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 0,16%, tarif parkir sebesar 0,14%, dan kue basah sebesar 0,09%. Selain itu, komoditas seperti bawang putih, telur ayam ras, ayam goreng, dan tomat juga memberikan kontribusi signifikan terhadap inflasi dengan masing-masing andil sekitar 0,08%, 0,07%, 0,07%, dan 0,06%. Sedangkan komoditas lain seperti Sigaret Putih Mesin (SPM), kue kering berminyak, sepeda motor, gula pasir, dan ice cream memberikan kontribusi yang lebih kecil tetapi masih signifikan, dengan masing-masing andil sekitar 0,05% hingga 0,03%..

Optimisme konsumen Kota Palu masih berada di level optimis, Rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Triwulan I laporan tercatat 129, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 139,33.

Meskipun terjadi penurunan, tingkat optimisme konsumen di Kota Palu masih tetap berada pada level optimis. Berdasarkan laporan Triwulan I, tercatat bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mencapai 129, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 139,33. Meski ada penurunan ini, angka IKK yang tetap berada di atas 100 menunjukkan bahwa mayoritas konsumen di Kota Palu masih memiliki keyakinan dan harapan positif terhadap kondisi perekonomian dan keadaan konsumsi di daerah mereka.

Penurunan angka IKK ini mungkin dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat optimisme konsumen di Kota Palu pada Triwulan I tahun 2024 mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi ekonomi lokal hingga faktor-faktor eksternal yang memengaruhi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Pertama, penurunan tingkat optimisme konsumen dari 139,33 persen pada triwulan sebelumnya menjadi 129 persen pada Triwulan I tahun 2024 bisa dijelaskan oleh sejumlah faktor internal. Salah satunya adalah ketidakpastian ekonomi yang mungkin timbul akibat perubahan kebijakan fiskal dan moneter, serta fluktuasi dalam permintaan domestik. Meskipun inflasi menunjukkan tren yang cenderung stabil, namun kenaikan harga-harga barang dan jasa terutama pada beberapa kelompok pengeluaran yang signifikan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap daya beli mereka.

Kedua, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar mata uang dan harga komoditas global juga dapat berdampak pada tingkat optimisme konsumen. Kota Palu sebagai bagian dari

ekonomi yang terhubung secara global tentu tidak luput dari pengaruh perubahan-perubahan tersebut. Misalnya, kenaikan harga komoditas tertentu dapat mengakibatkan naiknya harga barang-barang konsumen, sehingga meningkatkan biaya hidup dan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa. Ketidakpastian politik atau gejolak di tingkat internasional juga dapat memberikan dampak psikologis terhadap optimisme konsumen di tingkat lokal.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan I tahun 2024, Kota Palu mengalami serangkaian permasalahan yang memengaruhi stabilitas harga, khususnya dalam sektor pangan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah dampak dari peristiwa El Nino pada tahun 2023 yang masih berdampak pada produksi beras di wilayah tersebut. Penurunan produksi beras mengakibatkan kenaikan harga beras hingga mencapai 17 ribu per kilogram. Selain itu, kenaikan harga cabai yang signifikan pada bulan Januari juga memberikan tekanan tambahan terhadap ketersediaan dan harga bahan pangan, yang berdampak pada daya beli masyarakat.

Selanjutnya, masalah terkait distribusi dan penyaluran bahan bakar seperti bio solar menjadi fokus perhatian. Keluhan akan oknum yang terlibat dalam praktik premanisme dalam distribusi bio solar menyebabkan antrian panjang di SPBU, yang pada gilirannya berdampak pada kelancaran aktivitas ekonomi, termasuk sektor nelayan yang sangat bergantung pada bahan bakar untuk operasional mereka. Di samping itu, terdapat kasus penyaluran LPG di wilayah Kecamatan Palu Utara yang menghadapi masalah pangkalan yang menjual di atas harga eceran tertinggi, bahkan mencapai kenaikan harga hingga 22 ribu rupiah per tabung, yang secara signifikan mempengaruhi biaya hidup masyarakat.

Permasalahan lainnya yang menjadi fokus adalah praktik penimbunan barang di distributor menjelang bulan Ramadhan. Penimbunan ini menyebabkan kelangkaan pasokan dan kenaikan harga pada beberapa bahan pokok, termasuk beras. Selain itu, adanya praktik repacking beras SPHP menjadi merek baru dengan harga yang lebih mahal juga turut menjadi faktor dalam meningkatnya biaya hidup masyarakat.

Tidak ketinggalan, terhambatnya distribusi bantuan pangan di 48 kelurahan pada bulan Februari karena perubahan aturan yang mengharuskan penggunaan data P3KE pada tahun 2024, berbeda dengan aturan sebelumnya yang menggunakan data DTKS tahun 2023. Hal ini menyebabkan kelangkaan pasokan dan kesulitan akses bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan pangan. Rendahnya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras SPHP Bulog karena alasan kualitas yang rendah juga menjadi perhatian, mengingat beras merupakan salah satu komoditas pangan utama yang menjadi faktor pengendalian inflasi di Kota Palu.

Dengan demikian, permasalahan-permasalahan tersebut menjadi titik fokus dalam upaya pengendalian inflasi di Kota Palu pada Triwulan I tahun 2024. Diperlukan langkah-langkah strategis dan tindakan cepat dari pemerintah dan instansi terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berbagai forum koordinasi pengendalian inflasi Kota Palu yang dilakukan selama Triwulan I 2024 menekankan pada pentingnya upaya memitigasi dampak dari peningkatan harga dari komoditas utama penyumbang inflasi dan komoditas dengan nilai konsumsi terbesar di Kota Palu. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palu terus berkoordinasi baik dengan TPID Provinsi Sulawesi Tengah maupun Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dalam rangka pengendalian harga agar tingkat inflasi tetap berada pada sasaran target inflasi nasional, yakni 2,5% 1% melalui peningkatan program 4K (Ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan Komunikasi Efektif).

1. Di sisi Keterjangkauan Harga

- Penyelenggaraan Opearsi Pasar atau Pasar Murah komoditas pangan strategis bersubsidi dan komoditas penting lainnya dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok menyambut bulan suci ramadhan 1445 H, sebanyak 6 kali, di 3 Kelurahan 3 Kecamatan.

2. Di sisi Ketersediaan Pasokan

- Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman komsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, (pertemuan teknis penyuluhan pertanian);
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, (pelatihan petani/kelompok tani);
- Penyediaan dan penyaluran Beras SPHP Bulog sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;

3. Di sisi Kelancaran Distribusi

- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Layanan Bus Gratis Bagi Anak Sekolah 7 bus/trayek pada 11 Kelurahan dan 1 bus untuk kegiatan insidentil/layanan angkutan bahan pangan dan bapokting lainnya di 8 Kecamatan dalam rangka pengendalian inflasi);
- Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan di 3 (tiga) daerah Irigasi;
- Pembangunan jalan pada 8 (delapan) Kelurahan;
- Pemeliharaan berkala jalan pada 3 (tiga) Kelurahan;
- Rehabilitasi jalan pada 6 (enam) Kelurahan;
- Pemeliharaan rutin jalan di wilayah Kota Palu;
- Pemeliharaan rutin jembatan di wilayah Kota Palu.

4. Di sisi Komunikasi Efektif

- Aktif mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu melalui *zoom meeting*.
- Pelaksanaan *Capacity Building* dengan tema, *Capacity Buliding Tim Petugas Pendata Harga TPID Kota Palu*, pada tanggal 16 Januari 2024, dibuka oleh Wakil Wali Kota Palu;
- Pelaksanaan HLM TPID Kota Palu, tanggal 6 Februari 2024, dengan tema Strategi Menjaga Stabilitas Inflasi Pangan Menjelang Pemilu 2024 dan Bulan Suci Ramadhan 1445 H, dipimpin oleh Wakil Wali Kota Palu;

Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan Pemerintah Kota Palu Tentang Kerjasama Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah, Tanggal 6 Februari 2024;

- Rapat Koordinasi Teknis TPID Kota Palu, tanggal 22 Februari 2024, dalam rangka Stabilisasi Stok Pasokan dan Harga Kebutuhan Bahan Pokok menjelang Bulan Suci Ramadhan 1445 H serta Penyusunan Program Unggulan TPID Kota Palu 2024, dipimpin oleh Wakil Wali Kota Palu;
- Pelaksanaan *Capacity Building* Anggota Sekretariat TPID Kota Palu, Terkait Penyusunan Program Pengendalian Inflasi Guna Mencapai TPID Award 2024, di Pemerintah Kota Makassar, mulai tanggal 28 Februari sampai dengan selesai.
- Rapat Koordinasi Teknis TPID Kota Palu, tanggal 18 Maret 2024, dalam rangka menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri dalam Rakor Pengendalian Inflasi pada tanggal 18 Maret 2024, dipimpin oleh Wali Kota Palu;
- Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kab/Kota, (Informasi harga petugas SATGAS Pangan Kota Palu)
- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan;
- Pendataan Stok dan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting pada Distributor dan Agen di Kota Palu dalam rangka menekan inflasi daerah;
- Pemantauan Stok Barang dan Harga kebutuhan pokok di pasar dan swalayan menjelang bulan suci ramadhan 1445 H;
- Pengawasan Distribusi BBM Solar dan LPG 3 Kg Bersubsidi;
- Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat melalui Surat Edaran Wali Kota Palu nomor 500.2.4/0513/Ekonomi/2024 Tanggal 23 Februari 2024, tentang Belanja Bijak Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Komoditas Beras di Kota Palu;
- Penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah (Belanja Internet Gratis bagi masyarakat).

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan I laporan kebijakan pengendalian inflasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palu menunjukkan beberapa hal yang perlu dicermati. **Pertama**, terjadi penurunan inflasi *year on year (yoy)* dari 3,23% pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 2,41%. Meskipun turun, tingkat inflasi memerlukan pengawasan ketat untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat dengan demikian kebijakan pengendalian inflasi yang telah dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam meredam laju inflasi. **Kedua**, terdapat kenaikan inflasi *month on month (mom)* pada bulan Maret 2024 sebesar 0,26%, menandakan tekanan inflasi yang masih berlanjut. Analisis mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab kenaikan inflasi, terutama pada kelompok pengeluaran yang berkontribusi pada peningkatan harga. **Ketiga**, upaya pengendalian inflasi melalui strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) telah dilaksanakan dengan baik, termasuk penyelenggaraan pasar murah, monitoring ketersediaan pasokan, pengawasan distribusi pangan/Bapokting dan BBM dan LPG 3 Kg bersubsidi, serta komunikasi efektif antara TPID Kota Palu dengan TPID Provinsi Sulawesi Tengah dan TPIP yang merupakan langkah-langkah penting untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.

Oleh karena itu, sangatlah penting untuk secara berkala mengevaluasi program atau kegiatan yang telah dijalankan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palu melalui strategi 4K, yakni:

◦

1. Di sisi Keterjangkauan Harga:

- Langkah yang telah diambil dengan penyelenggaraan operasi pasar dan pasar murah telah mendukung upaya stabilisasi harga bahan Namun, penting untuk memastikan bahwa kegiatan ini dilakukan secara teratur dan terkoordinasi dengan baik.
- Perlu mempertimbangkan peningkatan frekuensi operasi pasar dan pasar murah untuk mencakup lebih banyak kelurahan dan kecamatan, terutama menyambut bulan suci Ramadhan atau dalam menghadapi situasi inflasi yang

2. Di sisi Ketersediaan Pasokan:

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal: Memperkuat pelatihan dan pendampingan terhadap masyarakat dalam mengembangkan kegiatan pertanian lokal yang beragam, termasuk pelatihan teknis, bantuan modal, dan peningkatan akses
- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana serta Prasarana Penyuluhan Pertanian: Memperhatikan peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan sarana penyuluhan pertanian, termasuk perluasan jangkauan penyuluhan ke wilayah-wilayah
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani: Intensifikasi pelatihan dan pendampingan terhadap kelompok petani dalam manajemen usaha, teknik pertanian modern, dan strategi pemasaran yang
- Penyediaan dan Penyaluran Beras SPHP Bulog: Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, Bulog, dan stakeholder terkait untuk memastikan distribusi beras yang efisien dan tepat waktu

3. Di sisi Kelancaran Distribusi:

- Upaya pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan telah dilakukan dengan baik untuk memperlancar Namun, pemeliharaan jalan dan jembatan harus diprioritaskan untuk memastikan kelancaran distribusi secara berkelanjutan.
- Perlu juga memperhatikan aspek lain dari distribusi seperti perbaikan infrastruktur irigasi dan dukungan terhadap angkutan umum, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau dengan

4. Di sisi Komunikasi Efektif:

- Langkah-langkah komunikasi efektif seperti rapat koordinasi dan capacity building telah dilakukan secara Namun, perlu ditingkatkan lagi keberlanjutan dan efektivitas dari komunikasi ini.
- Perlu memastikan bahwa informasi tentang harga dan stok barang sampai ke masyarakat secara tepat waktu dan akurat, serta memperkuat edukasi terkait belanja
- Penting untuk memastikan bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan secara menyeluruh dan efektif untuk mencapai target

Langkah yang Perlu diambil untuk Perbaikan:

- Memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program untuk mengetahui dampaknya secara lebih

Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian

- Menyusun strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mendukung sektor UMKM dalam pengendalian
- Memperluas cakupan kegiatan pengendalian inflasi untuk mencakup lebih banyak daerah yang mungkin rentan terhadap fluktuasi

Hal yang Masih Perlu Diperhatikan:

- Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap implementasi
- Memperkuat kapasitas SDM terkait dalam merespon dinamika pasar dan kebutuhan
- Menyelaraskan kebijakan pengendalian inflasi dengan tujuan pembangunan ekonomi lokal secara
- Memperkuat sistem informasi dan komunikasi untuk memastikan arus informasi yang cepat dan akurat kepada
- Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta stakeholders terkait

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Mencermati perkembangan realisasi tingkat inflasi Kota Palu, beberapa rekomendasi dalam HLM dan Rapat Koordinasi Teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palu antara lain:

- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pelaku usaha, dan produsen, distributor dan pengecer dalam rangka mencegah lonjakan harga, *panic buying*, serta mengantisipasi peningkatan permintaan selama periode pemilu dan Bulan Suci Ramadhan 2024;
- Melaksanakan pemantauan secara intensif terhadap ketersediaan stok kebutuhan bahan pokok dan harga-harga pangan di pasar dan swalayan;
- Memperkuat pengawasan terhadap distribusi pangan guna memastikan tidak ada praktik monopoli dan penimbunan yang dapat memacu kenaikan harga secara artificial;
- Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya berbelanja cerdas ditengah dinamika ekonomi yang ada;
- TPID Kota Palu agar segera menyusun program unggulan tahun 2024;
- Menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terkait Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dalam bentuk Penandatanganan Kesepakatan Bersama Tentang Kerjasama Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan pengendalian Inflasi;
- Menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan isu kelangkaan beras di Kota
- Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait ketersediaan stok dan harga serta tempat untuk mendapatkan beras subsidi pemerintah (Beras SPHP) di wilayah Kota Palu;
- Menghimbau masyarakat untuk tidak panik dalam berbelanja (*Panic Buying*) dan tetap bijak dalam berbelanja kebutuhan pokok sesuai dengan kebutuhan sehari-hari;
- Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap ketersediaan stok dan harga kebutuhan pokok di pasar menjelang Bulan Suci Ramadhan;
- Menyelenggarakan pasar murah terutama kebutuhan pangan strategis dalam rangka stabilisasi harga menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H;

Segera melakukan rapat Koordinasi bersama OPD/Instansi terkait dalam rangka persiapan menyambut kedatangan Ketua PKK Pusat, Ibu Tri Suswati di Kota Palu.

- Menghimbau kepada masyarakat untuk beralih untuk mengkonsumsi ke beras SPHP karena kualitas dan rasanya setara dengan beras premium yang dijual dipasaran harga relatif murah dan terjangkau. Dan beras SPHP bisa didapat dengan harga 54.500 per 5 kilogram;
- Memberikan informasi kepada masyarakat beras SPHP lebih murah dan
- Menginstruksikan pihak kelurahan untuk verifikasi data penerima bantuan pangan sehingga segera di salurkan pada triwulan 1.
- Menginstruksikan kepada pihak SPBU untuk bekerjasama dengan pihak Polri mencegah premanisme sehingga bio solar tepat sasaran kepada penerima manfaat.